

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi penting bagi tumbuh kembang anak dalam masa keemasan (*golden age*), yaitu usia 0-6 tahun. Pada tahap ini, aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, moral, dan agama sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan layanan pendidikan yang diterima. Pada masa inilah struktur otak berkembang dengan sangat pesat dan menentukan kualitas kehidupan anak di masa mendatang. Pendidikan pada usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang berkualitas, cerdas, sehat, dan berkarakter. Program Satu Desa Satu Paud adalah upaya strategis pemerintah (pusat dan daerah) untuk menjamin bahwa setiap desa memiliki setidaknya satu lembaga PAUD. Tujuannya adalah agar akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini merata, tanpa bergantung lokasi atau status ekonomi desa. Dengan memiliki PAUD di setiap desa, diharapkan anak-anak usia 0-6 tahun tidak perlu menempuh jarak jauh, sehingga kehadiran, partisipasi, dan kualitas pendidikan akan meningkat. dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat pedesaan.

Penelitian dan kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas memiliki dampak besar bagi kesiapan anak memasuki jenjang berikutnya, mempermudah adaptasi di SD, mengurangi kesenjangan pada awal pendidikan, dan meningkatkan hasil belajar jangka panjang. Oleh karena itu, penyediaan layanan PAUD yang merata dan berkualitas merupakan kebutuhan

mutlak dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD, khususnya pada pasal 6 ayat 1 yang berisi tentang pemerintah Daerah Kabupaten, Kota, dan Pemerintah Desa untuk mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 desa atau Kelurahan terdapat 1 PAUD artinya secara regulatif ada acuan bahwa tiap desa atau kelurahan harus memiliki paling tidak satu lembaga PAUD . Aturan ini mengamanatkan Pemerintah Desa untuk mengupayakan ketersediaan layanan PAUD di setiap desa atau kelurahan.

Namun kenyataannya belum semua wilayah di Indonesia memiliki akses merata terhadap layanan PAUD. Ketimpangan antarwilayah khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat terasa. Ada desa-desa yang belum memiliki lembaga PAUD sama sekali, terutama di daerah terpencil atau kondisi sosial-ekonominya kurang mendukung. Pemerintah menyadari adanya kesenjangan tersebut, sehingga pemerintah meluncurkan berbagai program untuk memperluas akses PAUD, dan Menyadari pentingnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini pemerintah indonesia menginisiasi “Program Satu Desa Satu PAUD”. sebagai bagian dari kebijakan pembangunan pendidikan inklusif dan merata. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki setidaknya satu satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi dan mampu memberikan layanan yang berkualitas, sehingga

anak-anak usia dini di desa tidak perlu menempuh jarak jauh atau mengalami hambatan akses untuk mendapatkan layanan PAUD.

Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta target tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua”. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD masih terkonsentrasi di wilayah kota, sementara banyak desa yang belum memiliki lembaga PAUD sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak anak usia dini terutama yang tinggal di pedesaan tidak mendapatkan layanan pendidikan awal yang memadai

Implementasi program “Satu Desa Satu PAUD” di berbagai daerah menunjukkan dampak positif terutama dalam meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) PAUD. Namun pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan, seperti kondisi geografis, pelayanan publik yang masih terbatas, dan variabilitas kapasitas aparatur pendidikan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi Program Satu Desa Satu PAUD. Dan beberapa desa mungkin masih minim fasilitas, kurangnya infrastruktur, kurang tenaga pendidik berkualitas, atau kurangnya dukungan dari sumber daya keuangan dan anggaran daerah. Selain itu, faktor budaya, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, serta koordinasi antar stakeholder (pemerintah desa, dinas pendidikan, masyarakat) juga memengaruhi pelaksanaan program.

Di kabupaten Hulu Sungai Tengah, Khususnya Kecamatan Labuan Amas Utara, terdapat 16 desa yaitu: Banua Kupang, Rantau Keminting, Kasarangan, Kadundung, Pemangkih, Pemangkih Seberang, Parumahan, Binjai Pemangkih, Tungkup, Samhurang, Tabat, Pahalatan, Binjai Pirua, Sungai Buluh, Mantaas, dan Rantau Bujur. Diantara 16 desa tersebut tidak semuanya memiliki lembaga satuan PAUD hanya beberapa desa saja yang memiliki lembaga PAUD. Yang tidak memiliki lembaga PAUD ada beberapa desa yaitu: Mantaas, Rantau Bujur, Sungai Buluh, Binjai Pirua, Pahalatan, Pemangkih Seberang, Kasarangan, Rantau Keminting, dan Banua Kupang.

Lebih jauh lagi kualitas layanan PAUD juga menjadi permasalahan yang kompleks. Banyak satuan PAUD di desa yang belum memenuhi standar nasional PAUD dari sisi kurikulum, sarana prasarana, hingga kualifikasi pendidik. Oleh karena itu selain mendorong kuantitas melalui pendirian lembaga PAUD di setiap desa, perhatian terhadap kualitas penyelenggaraan juga menjadi prioritas utama agar tujuan program ini benar-benar tercapai. Kebijakan dan regulasi di tingkat pemerintah daerah penting sebagai payung hukum dan pedoman operasional untuk pelaksanaan PAUD.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yaitu:

1. Minimnya Dukungan Regulasi dan Komitmen di Tingkat Desa

Banyak desa di Kecamatan Labuan Amas Utara belum menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang PAUD ataupun mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD. Hal ini melemahkan dasar hukum dan komitmen desa terhadap Program Satu Desa Satu PAUD.

2. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai

Fasilitas belajar di banyak PAUD desa masih sangat terbatas. Ada beberapa yang masih menggunakan rumah warga, balai desa, ataupun bangunan seadanya tanpa perlengkapan pendidikan anak seperti alat bermain edukatif, buku anak atau toilet anak yang layak

3. Ketimpangan Akses PAUD antar Desa

Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD belum merata. Beberapa desa sudah memiliki PAUD aktif, tetapi desa lain belum memiliki PAUD sama sekali atau hanya berbentuk layanan informal tanpa legalitas. Hal ini menciptakan kesenjangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Pendidik masih terbatas

Banyak desa berhasil mendirikan PAUD secara fisik, tetapi tidak memiliki pendidik yang memenuhi syarat.

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan menyusunnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus di Desa Parumahan dan Samhurang)”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus di Desa Parumahan dan Samhurang)”** maka penulis menggunakan fokus teori dari Van Metter & Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016: 150-153) diantaranya adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implmentasi Program Satu Desa Satu PAUD di Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Desa Parumahan dan Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.
- b) Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian.
- c) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana proses pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi dinas terkait, kepala desa, aparatur desa dan masyarakat yang terkait dalam pendidikan tentang Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

a) Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan Program dalam memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan desa dalam mengevaluasi Implementasi Program Satu Desa Satu PAUD Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta rekomendasi untuk perbaikan program tersebut.

b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan

penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk dapat mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan suatu program.

- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD di setiap desa, baik dari segi manajemen, SDM maupun sarana dan prasarana.

